

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah telah mengeluarkan anggaran untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan di Kabupaten Kutai Timur, namun pada saat ini partisipasi pemerintah belum menjanjikan bagi seluruh lapisan untuk memperoleh pendidikan yang sama. Dengan adanya bantuan dari perusahaan maka sarana dan prasarana dalam meningkatkan kualitas pendidikan dapat terpenuhi. Dalam proses pembangunan infrastruktur pemerintah melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan dalam mengelola sumber daya alam dan mengambil keuntungan dari hasil alam tersebut.

Dalam setiap pembangunan infrastruktur tentu memiliki kendala yang dihadapi pemerintah. Dengan melimpahnya sumber daya alam yang melimpah pemerintah memiliki keterbatasan untuk mengelola sendiri sumber daya alam tersebut. Dengan keterbatasan ini pemerintah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk dapat mengelola sekaligus melakukan pembangunan daerah melalui program *Corporate Social Responsibility*.

Salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah adalah Kabupaten Kutai Timur. Tambang batu bara terbesar terletak di kawasan Sangatta Kutai Timur, dengan hasil penjualan batu bara yang tinggi menjadikan pendapatan daerah ini cukup tinggi. Perkembangan Kabupaten Kutai Timur dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang pesat.

Pemerintah kabupaten Kutai Timur dalam mempercepat pembangunan melibatkan pemangku kepentingan untuk turut serta melakukan pembangunan. Pemerintah memberi kebebasan pada perusahaan untuk memberi bantuan langsung ke lokasi yang memerlukan bantuan dengan menyesuaikan arah pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Setelah merealisasikan bantuan pihak perusahaan atau pelaksanaan

bantuan diharapkan membuat laporan sehingga pemerintah tetap dapat mengawasi proses pembangunan untuk menghindari kesamaan dalam proses pembangunan.

Peraturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan tertera dalam Undang- Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang terdapat pada pasal 74 ayat 1 “ Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa perusahaan yang memanfaatkan alam sebagai bahan produksinya memiliki tanggung jawab sosial terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan pengelolaan baik itu internal maupun eksternal. Namun dalam Undang-undang ini belum dijelaskan mengenai pelanggaran seperti apa yang akan dikenakan sanksi atas aktivitas yang dilakukan perusahaan sehingga belum ada pembatasan kegiatan pengelolaan sumber daya alam.

Perusahaan sebagai salah satu pelaku bisnis yang memiliki peran untuk menjadi stakeholder pembangunan di Indonesia.Indonesia sendiri potensi setiap daerah hampir semua dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha sehingga menjadi daya tarik bagi banyak pihak untuk mendirikan perusahaan untuk dapat mengolah sumber daya baik itu yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Perusahaan memiliki perencanaan yang telah terencana terkait kepentingan perusahaan dan lingkungan sekitar pembangunan perusahaan. Perusahaan dalam melakukan aktivitas kerja melibatkan berbagai pihak, baik itu dari perusahaan itu sendiri,pihak pemerintah, pihak asing, pihak masyarakat dan masih banyak pihak terkait yang dilibatkan untuk kemajuan perusahaan. Menjalin kerjasama yang seperti ini akan membantu mempercepat pembangunan di Indonesia. Selain itu, kerjasama ini dilakukan agar sinergisitas antara semua pihak terjalin baik sehingga eksistensi perusahaan akan bertahan lama.

Dalam upaya menjaga hubungan antara perusahaan dan berbagai pihak terkhususnya masyarakat yang terkena dampak langsung karena lingkungan menjadi tempat beroperasinya kegiatan perusahaan sehingga diseimbangkan dengan dilaksanakannya *Corporate Social Responsibility*. *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap issue tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kontribusi dari perusahaan ini bisa berupa banyak hal, misalnya : bantuan dana, bantuan tenaga ahli dari perusahaan, bantuan berupa barang, dan lain-lain. Said (2015:25).Perusahaan menerapkan *Corporate Social Responsibility* akan berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian penduduk lokal. Dengan hal itu, perusahaan telah menaikkan kualitas hidup karyawannya beserta kesejahteraan keluarganya dan secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas.

Corporate Social Responsibility merupakan kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan yang berdampak positif bagi masyarakat. Program ini dilaksanakan guna mendapat kepercayaan dari masyarakat sekitar perusahaan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak hanya menguntungkan satu pihak saja sehingga perusahaan berkomitmen dengan program ini dapat menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan keperluan masyarakat secara merata.Pada dasarnya, kewajiban sosial seperti ini menjadi tanggung jawab pemerintah tapi tidak ada salahnya jika perusahaan membantu untuk meringankan beban pemerintah.Tanggungjawab seperti ini sebagai timbal balik karena kegiatan perusahaan mengakibatkan kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan yang dihasilkan perusahaan.

Dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 10/02.188.3/HK/VII/2006 tentang Pedoman *Corporate Social Responsibility* pada pasal 9 ayat 1 “Wilayah sasaran program *Corporate Social Responsibility* diprioritaskan untuk diterapkan pada wilayah yang terkena dampak langsung dari operasional perusahaan minimal 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan

program *Corporate Social Responsibility*” (<http://msh-csrkutim.com/perbup-kutai-timur/>). Dalam peraturan tersebut pemerintah menjelaskan bahwa pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* dapat langsung dilakukan oleh perusahaan atau dengan bekerja sama dengan pihak pemerintah atau dengan pihak-pihak yang dipercaya oleh perusahaan yang bersangkutan. Selain hal itu, perusahaan harus memperhatikan wilayah prioritas *Corporate Social Responsibility* agar tidak terjadi kesamaan terhadap program pemerintah di wilayah yang sama agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan dapat terealisasi tepat waktu. Dengan banyaknya perusahaan di daerah Kutai Timur semakin banyak dana *Corporate Social Responsibility* yang akan diterima daerah sehingga dengan adanya Peraturan Bupati mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan pembangunan di Kutai Timur khususnya pembangunan infrastruktur pendidikan di Sangatta Utara.

Forum Multi Stakeholder *Corporate Social Responsibility* sebagai wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan untuk berkomunikasi, berkonsultasi, dan bertindak bersama secara berkelanjutan dalam pengembangan dan pengelolaan *Corporate Social Responsibility* agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan kabupaten Kutai Timur. (<http://m.kaltim.prokol.co/read/news/16171-sosialisasi-peraturan-bupati-kutim-tentang-csr-3>) di akses pada rabu 22-03-2017

Dalam hal ini pemerintah bekerjasama dengan PT. Kaltim Prima Coal melalui program *Corporate Social Responsibility* untuk membangun infrastruktur pendidikan. PT. Kaltim Prima Coal membantu pemerintah dalam membangun gedung sekolah dan memberikan bantuan berupa beasiswa terhadap siswa berprestasi. Bantuan yang diberikan oleh perusahaan ini diimbangi dengan program-program pemerintah sehingga sinergisitas antara kedua pihak diperlukan untuk menghindari terjadinya program yang sama.

Program *Corporate Social Responsibility* yang dilaksanakan oleh PT. Kaltim Prima Coal khususnya di wilayah Sangatta Utara karena wilayah ini dekat dengan lokasi pertambangan sehingga menjadi prioritas memperoleh bantuan dan sejauh ini telah terealisasi dengan baik dan tepat sasaran. Perusahaan tambang batu bara PT Kaltim Prima Coal (KPC) melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada 2012 mengucurkan Rp1,6 miliar untuk sektor pendidikan, seperti membangun sejumlah gedung sekolah dan infrastruktur pendidikan lainnya. Dalam penggunaan dana sebesar 1,6 miliar diwujudkan dalam bentuk pembangunan tiga ruang SMPN 002 Sangatta Utara, serta bantuan furniture SMPN 004 Sangatta Utara. Kemudian ruangan kelas SD Kristen Kefas, pembuatan halaman dan pagar Sekolah Luar Biasa (SLB) Bahasa Hati Sangatta Utara dan ruang kelas TKA ABA Sangatta Utara dan bantuan lainnya untuk beberapa sekolah di Sangatta. Yordhen Ampung didampingi Supervisor Media Silvester Pantur, mewakili GM ESD Huzeinsyah Akma dan Manager External Relation Hasrul Sani, mengatakan, bantuan senilai Rp1,6 miliar itu di luar bantuan beasiswa yang juga setiap tahunnya dilakukan KPC bagi anak-anak Kutai Timur yang berprestasi. (<http://kaltim.antaranews.com/berita/13333/kpc-kucurkan-rp16-miliar-untuk-pendidikan>) di akses pada sabtu 01-10-2016.

PT. Kaltim Prima Coal bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk dapat mewujudkan sumber daya manusia di Kutai Timur yang berkualitas PT. Kaltim Prima Coal mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk melaksanakan program beasiswa mulai pada tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi program doktor S3. Program pendidikan ini menjadi prioritas perusahaan karena dirasa perlu sebagai tanggung jawab sosial terhadap dampak yang disebabkan aktivitas perusahaan. PT. Kaltim Prima Coal berkomitmen untuk dapat selalu melanjutkan program dan mendukung pemerintah terhadap program Kutim Cemerlang yang fokus utama dari program tersebut putra/putri daerah Kutai Timur dapat menempuh pendidikan dengan kondisi ruang dan lingkungan yang nyaman.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selain mencanangkan wajib belajar 12 tahun bagi seluruh putra/putri daerah memiliki program Kutim Cemerlang. Kutim Cemerlang merupakan salah satu cara pemerintah Kutai Timur dalam mendukung sumber daya manusia diranah pendidikan dari segi pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberikan beasiswa kepada seluruh peserta didik yang mengajukan beasiswa sesuai dengan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Beasiswa ini tidak hanya bagi peserta yang menempuh pendidikan di wilayah Kutai Timur saja melainkan bagi peserta yang menempuh pendidikan di luar daerah bahkan luar negeri. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur ialah kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program *Corporate Social Responsibility*.

Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas, penulis ingin melakukan penelitian dan mengetahui permasalahan mengenai “KERJASAMA PEMERINTAH DAN PT. KALTIM PRIMA COAL MELALUI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN SANGATTA UTARA KABUPATEN KUTAI TIMUR 2012-2015”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang akan dirumuskan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama Pemerintah dan PT. Kaltim Prima Coal melalui program *Corporate Social Responsibility* dalam bidang pendidikan di Kecamatan Sangatta Utara ?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat kerjasama *Corporate Social Responsibility* dalam bidang pendidikan oleh Pemerintah dan PT. Kaltim Prima Coal ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama penelitian ini menjawab masalah terkait di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui kerjasama program *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh Pemerintah dan PT. Kaltim Prima Coal dalam bidang pendidikan di Kecamatan Sangatta Utara.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kerjasama *Corporate Social Responsibility* oleh Pemerintah dan PT. Kaltim Prima Coal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah pengetahuan terhadap pengembang tanggung jawab sosial perusahaan bagi pendidikan di Kecamatan Sangatta Utara.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai evaluasi bagi perusahaan dalam melaksanakan dan tanggung jawab *Corporate Social Responsibility* agar lebih bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan kedepannya.

E. Kerangka Dasar Teori

A. Publik Privat Patnership

Partnership (kemitraan) merujuk pada Mohr dan Spekman adalah hubungan strategik yang secara sengaja dirancang atau dibangun antara perusahaan-perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, manfaat bersama dan saling kebergantungan yang tinggi (dalam Jane 2011:193). Menurut Sumarto (2009:116) *partnership* adalah hubungan yang terjadi antara *civil society*, pemerintah dan atau sektor swasta dalam rangka mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian. *Publik Private Patnership* (PPP) atau biasa disebut juga dengan kerjasama pemerintah swasta (KPS) merupakan mekanisme pembiayaan alternatif dalam pengadaan pelayanan publik yang telah digunakan secara luas diberbagai negara khususnya negara maju (Sekretariat A4DE, 2012:1).

Menurut Aderson yang dikutip oleh Ibrahim (2006:26) menjelaskan yang menjadi karakteristik atau ciri umum dari suatu kerjasama yang dibuat oleh para pihak dalam hal kemitraan adalah:

1. Timbul karena adanya keinginan untuk mengadakan hubungan konsensual, dimana keinginan itu timbul bukan karena diatur oleh undang-undang (melainkan dari masing-masing pribadi para pihak)
2. Selalu melibatkan unsur-unsur seperti modal, pekerja atau gabungan dari keduanya.
3. Pada umumnya terdiri atas perusahaan (firma) dan mitranya.

Adapun pola kemitraan menurut Sulistiyani (2004:130-131) diilhami dari fenomena biologis kehidupan organisme dan mencoba mengangkat ke dalam pemahaman yang kemudian dibedakan menjadi berikut :

1. Pseudo Partnership atau kemitraan semu

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

2. Kemitraan mutualistik

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat salingsilang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu sama lain.

3. Kemitraan Konjugasi

Kemitraan Konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “paramecium”, dua paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu samalain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi,agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai

tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

B. Corporate Social Responsibility

Tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. *Corporate Social Responsibility* berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan” di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalkan keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Rumaswati (2013: 405)

Menurut beberapa ilmuan Petkoski dan Twose (2003) mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen bisnis untuk berperan dan mendukung pembangunan ekonomi, bekerjasama dengan karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal dan masyarakat luas serta meningkatkan mutu hidup mereka dengan berbagai cara yang menguntungkan bagi bisnis dan pembangunan. Rumaswati (2013: 405)

Sedangkan menurut (Suharto, Edi 2007) *Corporate Social Responsibility* adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungan (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan professional, perusahaan-perusahaan yang memiliki reputasi baik, umumnya memiliki enam hal. Pertama, hubungan yang baik dengan pemuka masyarakat. Kedua, hubungan positif dengan pemerintah setempat. Ketiga, resiko krisis yang lebih kecil. Keempat, rasa kebanggaan dalam organisasi dan diantara khalayak sasaran. Kelima, saling pengertian antara

khalayak sasaran, baik internal maupun eksternal. Dan terakhir. Meningkatkan kesetiaan para staf perusahaan (Anggoro, 2002). Rumaswati (2013: 405)

Keith Davis dan Robert Blomstrom (Carroll, 1999) menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial mengacu pada kewajiban untuk mempertimbangkan efek dari keputusan dan tindakan perusahaan pada sistem sosial dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan orang lain yang terpengaruh oleh tindakan bisnisnya. Dengan demikian, pelaku bisnis (perusahaan) terlihat melampaui kepentingan ekonomi dan kepentingan mereka sendiri. (Hasan dan Andriany 2015:24)

Frederick dkk.(1992) *Corporate Social Responsibility* dapat didefinisikan sebagai prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan seharusnya bertanggung jawab terhadap dampak dari setiap tindakan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Pengertian ini mengandung dimensi: kesukarelaan, pemangku kepentingan, sosial dan lingkungan. (Hasan dan Andriany 2015:39)

Khoury dkk.(1999) *Corporate Social Responsibility* adalah keseluruhan hubungan korporasi dengan semua pemangku kepentingannya. Ini termasuk pelanggan, karyawan, masyarakat, pemilik/investor, pemerintah, pemasok dan pesaing. Elemen tanggung jawab sosial meliputi investasi dalam pelayanan masyarakat, hubungan karyawan, penciptaan dan pemeliharaan pekerjaan, pengelolaan lingkungan, dan kinerja keuangan. Pengertian ini mengandung dimensi: kesukarelaan, pemangku kepentingan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. (Hasan dan Andriany 2015:40)

World Business Council For Sustainable Development (2000) *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen bisnis secara terus menerus untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan sosial ekonomi, sementara pada saat yang sama meningkatkan kualitas kehidupan tenaga kerja dan keluarganya sebagai bagian dari

masyarakat setempat dan masyarakat luas. Pengertian ini mengandung dimensi :kesukarelaan,sosial, dan ekonomi. (Hasan dan Andriany 2015:41)

Marsden (2001) Corporate Social Responsibility adalah perilaku perusahaan terkait dengan masyarakat yang terkena dampak dari operasi perusahaan. CSR tidak sekadar kegiatan filantropi, tetapi menghasilkan keuntungan bisnis yang memerlukan perhitungan dampak positif dan negatif lingkungan, sosial, dan ekonomi pada masyarakat .pengertian ini mengandung dimensi : sosial, lingkungan, dan ekonomi. (Hasan dan Andriany 2015:43).

Hopkins ,(2003) Corporate Social Responsibility berkaitan dengan perilaku perusahaan yang etis atau bertanggung jawab. Etis atau bertanggung jawab sosial berarti para pemangku kepentingan bersikap dan berperilaku secara baik agar diterima masyarakat.Tanggung jawab sosial merupakan bagian dari tanggung jawab ekonomi.Tanggung jawab ini meliputi pemangku kepentingan yang baik di dalam atau di luar perusahaan.Tanggung jawab sosial bertujuan menciptakan standar hidup yang lebih tinggi serta keuntungan perusahaan bagi masyarakat yang berada di dalam atau di luar perusahaan. Pengertian ini mengandung dimensi: kesukarelaan, pemangku kepentingan, sosial, dan ekonomi.(Hasan dan Andriany 2015:47).

Strategis (2003) Corporate Social Responsibility adalah kontribusi bisnis terhadap pembangunan berkelanjutan, yakni pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, dan secara umum dipahami sebagai pembangunan yang berfokus pada upaya mencapai interagrasi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pengertian ini mengandung dimensi: sosial, lingkungan, dan ekonomi.(Hasan dan Andriany 2015:49).

Menurut Susiloadi 2008:128 Model atau pola *Corporate Social Responsibility* yang umum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sebagai berikut:

- a. *Corporate Social Responsibility* bisa dilaksanakan secara langsung oleh perusahaan.
- b. *Corporate Social Responsibility* bisa pula dilaksanakan oleh yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan atau groupnya.
- c. Sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan *Corporate Social Responsibility* melalui kerjasama atau bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan *Corporate Social Responsibility* melalui kerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, LSM, atau lembaga konsultan baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosial.
- d. Beberapa perusahaan bergabung dalam sebuah konsorsium untuk secara bersama-sama menjalankan *Corporate Social Responsibility*.

Dalam Jurnal Satwari (2015:4), Faktor pendukung kerjasama program *Corporate Social Responsibility* menurut Susanto (2007:43), terdapat beberapa faktor pendukung perusahaan terkait program *Corporate Social Responsibility*, di antaranya sebagai berikut :

- a. Menciptakan brand image dan brand reputation
- b. Mengatasi krisis manajemen
- c. Meningkatkan motivasi karyawan dan menarik karyawan berkualitas.
- d. Menciptakan motivasi.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa faktor penghambat kerjasama program *Corporate Social Responsibility* dalam bidang pendidikan di Kutai Timur yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan.

Menurut Cohen dan Uphont dalam Harahap dkk (2007:48) partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi

sumberdaya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi pembangunan. Satwari (2015:11)

C. Pembangunan

Menurut Effendi (2002:9), bahwa pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna, daya hasil guna yang merata dan berkeadilan. Pembangunan merupakan upaya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, dari suatu keadaan yang kurang baik menjadi suatu yang lebih baik, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada. Pembangunan yang mengarah pada suatu perubahan dan perbaikan ke arah yang akan datang adalah pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Menurut Bintaro Tjokroamidjojo dan Mustapadidjaja A.R dalam Nyoman Sumardi (1994:25), pembangunan adalah proses perubahan sebagai dimensi kehidupan manusia yang berlangsung secara terus menerus. Perubahan ini bisa terjadi dengan sendirinya (*self-sustaining process*) bisa juga dengan pengaruh atau arahan dari pemerintah. Lalu Ginanjar Kartasmita (1994:9) mengatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. (Mering 2015:1768)

Mengenai definisi tentang istilah pembangunan itu sendiri Riyadi (1981) mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak, namun kesemuanya itu mengarah kepada ke suatu kesepakatan bahwa:

“Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu-hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang

berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu". (Theresia, Andini, Nugraha , dan Mardikanto 2014:2)

Muhi et. Al (1993) mengemukakan beberapa pendekatan teoritis pembangunan, yaitu:

1. Teori evolusi , yang mengacu kepada evolusi peradaban yang dikemukakan oleh Charles Darwin yang menyebutkan bahwa setiap komunitas akan mengalami perubahan dari kehidupan yang sangat sederhana ke arah yang semakin kompleks, sebagai akibat dari perubahan-perubahan: sosial, ekonomi, kependudukan, geografi, rasial, teknologi, maupun ideology.

2. Teori Perubahan Sosial

Emile Durkheim (1964), yang menyatakan bahwa pembangunan terjadi sebagai akibat adanya perubahan struktur sosial dalam bentuk " pembagian pekerjaan". Sedangkan Redfield (1947) menyatakan bahwa pembangunan terjadi karena terjadinya perubahan masyarakat tradisional ke arah masyarakat perkotaan.

3. Teori Struktural Fungsional

Parsons (1851) mengemukakan bahwa pembangunan terjadi karena adanya perubahan status dari suatu interaksi sosial yang terjadi dalam:

- a. Adaptasi terhadap kebutuhan situasional
- b. Pencapaian tujuan-tujuan
- c. Integrasi atau pengaturan tata-hubungan
- d. Pola pemeliharaan atau pengurangan ketegangan dari pola budaya tertentu.

4. Teori Ekonomi

Gunar Mrdal (1970) mengemukakan bahwa pembangunan terjadi karena beberapa kondisi ekonomi yang mencakup:

- a. Hasil dan pendapatan,
 - b. Tingkat produktivitas ,
 - c. Tingkat kehidupan,
 - d. Sikap dan pranata
 - e. Rasionalitas
5. Teori Konflik yang dicetuskan oleh Karl Marx (1919-1883) yang menyatakan bahwa pembangunan terjadi karena adanya konflik atau pertentangan kepentingan ekonomi antar kelas antara kelas pemodal (yang berkuasa) dan kelas yang tertindas.

Teori Ekologi, yang dikemukakan oleh Odum (1971) tentang hubungan antar manusia dengan lingkungannya (fisik dan sosial).

6. Teori Ketergantungan yang berkembang di Amerika latin sebagaimana dilaporkan oleh Frank (Wilber, 1979) di mana Negara maju mendominasi Negara yang belum berkembang, sedemikian rupa sehingga pembangunan di Negara yang belum maju sangat tergantung kepada kehendak/ kebutuhan Negara maju yang menjadi “penjajah”nya.

a. Pendekatan Pembangunan Modernisasi

1. Modernisasi merupakan proses sistematis. Modernisasi melibatkan perubahan pada hampir segala aspek tingkah laku sosial, termasuk di dalamnya industrialisasi, urbanisasi, diferensiasi, sekularisasi, sentralisasi dan sebagainya. Proses modernisasi terlihat seperti menggali satu lubang di satu tempat secara terus menerus, dan oleh karena itu wajah aspek-aspek modernisasi akan tampil secara mengelompok dan baraturan ketimbang secara terpisah-pisah. Suwarsono dan So (2006:23)

2. Modernisasi diartikan sebagai proses transformasi. Dalam rangka mencapai status modern, struktur dan nilai-nilai tradisional secara total harus diganti dengan seperangkat struktur dan nilai-nilai. Suwarsono dan So (2006:23)

3. Modernisasi melibatkan proses yang terus-menerus(immanent). Karena modernisasi bersifat sistematis dan transformatif, proses modernisasi melibatkan perubahan sosial yang terus menerus dalam sistem sosial. Suwarsono dan So (2006:23)

b. Pendekatan Pembangunan Dependensi

a. Teori dependensi berusaha menggambarkan watak-watak umum keadaan ketergantungan di dunia ketiga sepanjang sejarah perkembangan kapitalisme dari abad ke-16 sampai sekarang. Ciri-ciri khas satu Negara yang tak terhindarkan antara satu Negara dengan Negara lainnya dalam pengalaman pembangunan politik-ekonominya yang pada gilirannya kemudian membentuk kompleksitas sejarah berkembang dunia, nampak terabaikan, tertutup oleh semangat untuk mencoba menyampaikan bentuk ideal tatanan ketergantungan. Suwarsono dan So (2006:104)

b. Ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh “faktor luar”. Sebabterpenting yang menghambat pembangunan karenanya tidak terletak pada persoalan kekurangan modal atau kekurangan tenaga dan semangat wiraswasta, melainkan terletak berada diluar jangkauan politik ekonomi dalam negeri suatu Negara. Suwarsono dan So (2006:104)

c. Teori dependensi menyadari sepenuhnya, bahwa para penguasa yang telah mapan, pemilik modal besar, petani kaya dan tuan tanah, para pemimpin organisasi keagamaan, pemimpin informal masyarakat, serta para elite yang lain kemungkinan besar tidak akan menyetujui kebijaksanaan pembangunan yang

mencoba memutuskan hubungan dengan Negara maju yang selama ini telah terbina dengan baik, sebagai akibat telah demikian erat keterkaitan kepentingan politik-ekonomi mereka dengan kepentingan politik ekonomi mereka dengan kepentingan Negara maju. Suwarsono dan So (2006:105).

c. Bentuk- Bentuk Pembangunan

4. Pembangunan fisik

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat. Menurut B.S Muljana (2001:3) pembangunan yang dilaksanakan pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana , yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan produksi, logistik dan pemasaran barang dan jasa serta kegiatan-kegiatan lain dibidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan. Pramana (2013:586)

5. Pembangunan Non Fisik

Di dalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembangunan fisik tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. Bachtiar Effendi (2002:114). Oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun non fisiknya. Yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik atau sosial yaitu : pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Pramana (2013:587)

Menurut Utomo (2010:36) program-program CSR perusahaan yang selama ini dijalankan mengacu pada kegiatan lima aspek (*The Five Pillars*) dan *sustainable development project*. Konsep lima aspek yaitu: (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) ekonomi, (4) sosial, budaya, agama, dan (5) keamanan telah dilaksanakan oleh perusahaan. Namun, kegiatan yang dilaksanakan masih sebatas charity. Sehingga pada

perusahaan yang menerapkan hal tersebut biasanya ditambah dengan *Suitable Development Project* yang lebih mengutamakan keberlangsungan proyek CSR. (Satwari:2015)

Adapun kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan PT. Kaltim Prima Coal melalui Program Corporate Social Responsibility dalam bidang pendidikan dapat diperinci sebagai berikut :

a. Kerjasama dalam Program Pendidikan

1. Beasiswa yang diberikan melalui Program Corporate Social Responsibility oleh PT. Kaltim Prima Coal sebagai bentuk dukungan dalam menjalankan proses belajar dalam penyerahan dana kepada setiap penerima beasiswa untuk dapat digunakan sebagai biaya operasional selama sekolah.
2. Infrastruktur Pendidikan merupakan proses pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun non fisik.
3. Lomba Keterampilan Siswa (LKS), merupakan lomba yang diadakan pihak sekolah yang melibatkan pihak eksternal. Dengan adanya Lomba Keterampilan Siswa ini pihak sekolah mengetahui sejauh mana kreatifitas siswa-siswi selama mengikuti proses belajar.
4. Uji Kompetensi Siswa SMK, merupakan salah satu ujian wajib diikuti bagi siswa-siswi sekolah kejuruan. Dengan diadakan ujian ini siswa yang lulus ujian akan memperoleh sertifikat keahlian masing-masing.

F. Definisi Konseptual

Suatu hal yang penting dalam melakukan penelitian adalah memberi batasan akan hal yang akan diteliti agar tidak terjadi perbedaan yang pendapatnya sehingga memperoleh gambaran yang tepat terhadap masalah yang diteliti.

1. Publik Privat Patnership

Partnership adalah hubungan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam upaya mencapai tujuan yang sama dalam mengembangkan baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk memperoleh keuntungan.

2. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap dampak yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan akan dampak kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar dengan memberikan bantuan yang berdampak positif bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa dirugikam atas kegiatan perusahaan.

3. Pembangunan

Pembangunan ialah kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pembangunan yang dilakukan secara terencana dan dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.

G. Definisi Operasional

1. Kerjasama Program Pendidikan

- a. Beasiswa
- b. Infrastruktur pendidikan
- c. Lomba keterampilan siswa (LKS)
- d. Uji kompetensi Siswa SMK

2. Susanto (2007:43) Faktor pendukung kerjasama *Corporate Social Responsibility* dalam bidang pendidikan
 - a. Menciptakan brand image dan brand reputation
 - b. Mengatasi krisis manajemen
 - c. Meningkatkan motivasi karyawan dan menarik karyawan berkualitas.
 - d. Menciptakan inovasi
3. Faktor penghambat kerjasama *Corporate Social Responsibility* dalam bidang pendidikan
 - a. Kurangnya partisipasi masyarakat

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif , yang bertujuan untuk dapat menjelaskan secara rinci kegiatan program *Corporate Social Responsibility* dalam bidang pendidikan di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.

2. Unit Analisa

Unit analisa merupakan obyek nyata yang akan diteliti. Adapun unit analisa yang akan dilibatkan adalah dari PT. Kaltim Prima Coal, Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah.

3. Jenis data

- a. Data primer

Semua data dan informasi yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal, referensi internet , dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan CSR.

I. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview / wawancara

Interview merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada obyek penelitian dalam hal ini yang akan menjadi narasumber pertama ialah Supervisor PT. Kaltim Prima Coal Bapak Rusdiansyah dan ibu Rosna selaku Officer Pendidikan, Kepala bidang pendidikan dasar dan menengah dinas Pendidikan Bapak Dawut, S.Pd, MM dan Drs. Azhari MM dan Kepala Sekolah Bapak Supriadi S.Pd dan Ibu Suwarlis.

b. Obseravasi

Peneliti melakukan observasi langsung ke lingkungan yang menjadi obyek penelitian untuk mendapat data yang akurat. Dalam observasi ini, peneliti fokus terhadap program *Corporate Social Responsibility* dalam bidang pendidikan, beasiswa, Lomba Keterampilan Siswa dan Uji Kompetensi Siswa SMK di Sangatta Utara Kutai Timur.

c. Dokumentasi/ Kepustakaan

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi agar dapat mengumpulkan data dan mempelajari dokumen-dokumen terkait dengan laporan pelaksanaan program CSR di bidang pendidikan yang diperoleh dari PT. Kaltim Prima Coal dan Laporan Implementasi

Pembangunan Berkelanjutan dari tahun 2012 hingga 2015 milik PT. Kaltim Prima Coal, data dari perusahaan yang menjadi obyek penelitian sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 1.1

Teknik Pengumpulan Data

No	Data Tentang Masalah	Teknik Pengumpulan Data	Ket / Sumber
1.	- Rencana program CSR dibidang pendidikan - Kerjasama yang terjalin antara perusahaan dan pemerintah	Wawancara	- Supervisor ESD -Officer pendidikan - Kepala Bidang Pendidikan - Kepala Sekolah
2.	Pembangunan gedung sekolah	Observasi	-lokasi pembangunan
3.	Pembangunan apa saja di bidang pendidikan yang telah terealisasi	Dokumentasi	-Laporan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan 2012-2015